

BAILEO:

JURNAL SOSIAL HUMANIORA

Volume: I
Nomor : I, September 2023

FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA
e-ISSN 3026-3468
p-ISSN 3026-2593
Naskah diterima:
31/08/2023;
direvisi akhir:
25/09/2023;
disetujui:
26/09/2023;

ALOKASI DANA DESA YANG MENCERAHKAN: MELACAK UPAYA MENCEGAH DISPARITAS SOSIAL DI NEGERI TAWIRI, MALUKU

Juita Ratna Sari Manurung^{1*}, Jusuf Madubun², Muhtar³
1,2,3 Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura

*Email korespondensi: juitamanager@gmail.com



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license.

ABSTRACT

This study concerns the Village Allocation Fund (ADD) Policy in Preventing Social Disparities in Tawiri Village, Teluk Ambon District. The aim is to understand how the ADD policy prevents social disparities in Tawiri Village. The study used a qualitative descriptive methodology at the Tawiri Village Office. The data types used were primary and secondary, and data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The focus of this study includes 1) improving the quality of human resources, 2) providing equal access to all members of the community, 3) optimizing the management and utilization of resources, and 4) promoting even development and creating job opportunities. The results of this study indicate that the ADD policy in Tawiri Village has a positive impact on improving human resources. Similarly, the ADD policy in Tawiri Village can provide access to all community members. Furthermore, the ADD policy in Tawiri Village can be well-optimized through its management. Additionally, the ADD policy in Tawiri Village positively impacts even development and can create job opportunities.

Keywords: Policies; Village Allocation Funds; Social Disparities

ABSTRAK

Kajian ini tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Mencegah Disparitas Sosial di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana kebijakan ADD dalam mencegah disparitas sosial di Negeri Tawiri. Lokasi kajiannya di Kantor Negeri Tawiri, dengan metodologi deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Adapun deskripsi fokus dari kajian ini mencakup : 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), 2) memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat, 3) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, dan 4) pemerataan pembangunan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hasil kajian ini menunjukkan kebijakan ADD di Negeri Tawiri berdampak positif terhadap meningkatnya SDM. Begitu pula kebijakan ADD di Negeri Tawiri dapat mengakses seluruh warga masyarakat. Bahkan kebijakan ADD di Negeri Tawiri melalui pengelolannya dapat dipotimalkan dengan baik. Serta kebijakan ADD di Negeri Tawiri berdampak positif pada pemerataan pembangunan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Kata kunci: Kebijakan; Alokasi Dana Desa; Disparitas Sosial

PENDAHULUAN

Pengaturan desa secara tegas dan konsisten mengenai anggaran biaya pembangunan desa baik ditingkat nasional maupun daerah sangat penting dilaksanakan (Syafingi et al., 2018). Karena kewenangan daerah dalam mengatur proporsi anggaran pembangunan desa merupakan wujud keberpihakan pada masyarakat desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang desa) (Fifqiazah & Rizka, 2023).

Pendapatan Desa dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari : a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, f. Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan Desa yang sah (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa) (Kharisma, 2023; Mlik et al., 2022).

Menurut Undang-Undang terbaru tentang Dana Desa (DD) Tahun 2018 yaitu: Arah kebijakan DD tahun 2018 adalah : 1. Menyempurnakan formula pengalokasian DD, 2. Fokus pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan DD, 4. Mempertajam prioritas penggunaan DD untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan diadakannya peraturan ini adalah agar menurunkan tingkat kemiskinan yang terjadi terutama terhadap daerah yang masih tertinggal dan dapat meningkatkan akuntabilitas masyarakat dalam memberikan partisipasi untuk kegiatan sosial dari desa (Indriasih et al., 2022; Nurlukman & Said, 2019; Syahrudin et al., 2023).

Dari peraturan diatas menunjukkan adanya transparansi yang kuat dari pemerintah terhadap penggunaan dana desa. Namun yang menjadi persoalan dalam negara kita, bahwa dana desa yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan diserahkan kepada birokrasi desa tidak dijalankan dengan baik atau adanya penyelewengan dana desa sehingga dana de sa dijadikan sebagai lahan korupsi terhadap pembangunan contohnya kasus yang terjadi pada Raja Negeri Tawiri JNT, SR selaku bendahara, NL sebagai sekretaris Negeri Tawiri yang didakwa ketiganya yang didakwa melakukan dugaan pidana korupsi kerugian Negara sebesar Rp 3 miliar dari hasil audit inspektorat (Taufiq et al., 2022).

Saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum JPU membantah menerima uang bantuan dari dana desa Tawiri. Saksi-saksi yang dipanggil yaitu : JS, GSC, AL, JD, CH, LS, YS, dan FS. Kepala tukang pengerjaan Drainase YS misalnya mengaku pada tahun 2018 hanya menerima uang Rp 27 juta sebagai upah kerja padahal dalam laporan pertanggung jawaban tertulis saksi menerima total Rp 118 juta. Dari saksi CH yang berprofesi sebagai nelayan juga demikian bahkan hanya menerima bantuan berupa sebuah perahu 8 jaring perahu dan lainnya tanpa menerima uang sepeserpun.

Semua keterangan saksi berbanding terbalik dari laporan pertanggungjawaban para terdakwa bahkan para saksi mengakui tanda tangan yang tertera dalam kwitansi dan laporan tersebut bukan milik mereka (Budiana et al., 2019; Tulis et al., 2018). Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaan penyaluran dana desa tetap harus melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan laporan penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017.

Yang termuat pada pasal I yaitu transfer ke daerah dan dana desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah Belanja Negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa (Budiarto et al., 2020; Havivah et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan diatas dimana penyalahgunaan anggaran dana desa diselewengkan oleh oknum-oknum masyarakat desa setempat, sehingga dugaan penulis penyalahgunaan ini menyebabkan adanya ketimpangan sosial maupun kesenjangan sosial di dalam masyarakat Negeri Tawiri, sehingga pemanfaatan dana desa itu tidak maksimal dan tidak tepat sasaran sehingga inilah yang kemudian membuat penulis tertarik mengambil judul jurnal tentang : “Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Mencegah Disparitas Sosial Di Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode deskriptif kualitatif (Creswell & Poth, 2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Alokasi Dana Desa (ADD) dengan fokus pada upaya mencegah disparitas sosial di Negeri Tawiri, Maluku. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ADD berperan dalam mengatasi disparitas sosial di wilayah tersebut. Jenis data yang akan digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat desa, anggota masyarakat, dan penerima manfaat ADD di Negeri Tawiri. Wawancara akan direkam untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Sementara itu, data sekunder akan diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah, studi terdahulu, dan literatur terkait yang akan memberikan konteks yang lebih mendalam tentang kebijakan ADD dan situasi sosial di Negeri Tawiri. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis secara tematik untuk menggambarkan peran ADD dalam mencegah disparitas sosial di Negeri Tawiri. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dampak kebijakan ADD dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkannya dalam rangka mencapai tujuan sosial yang lebih merata di wilayah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kebijakan pembangunan nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah telah membawa perubahan signifikan dalam strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi kunci dalam daya saing setiap daerah di Indonesia. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Bernard Ubuwala, mengungkapkan bahwa meskipun secara umum SDM di Negeri Tawiri dapat dikatakan merata, namun pada beberapa sektor tertentu, disparitas masih terasa (Alisaha et al., 2022; Kasidi & Yustika, 2022). Sebagai contoh, dalam sektor perikanan, sebagian besar masyarakat masih bergantung pada teknik penangkapan ikan yang bersifat tradisional, tanpa adanya inovasi atau peningkatan ke arah yang lebih modern. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan SDM di sektor-sektor tertentu belum sepenuhnya merata (Muzaqi et al., 2022).

Wawancara dengan Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Bapak William Marihuru, juga menambahkan perspektif yang serupa. Beliau mencatat bahwa ketidakmerataan dalam pengembangan SDM di Negeri Tawiri terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM mereka. Akibatnya, penduduk non-asli Negeri Tawiri atau pendatang seringkali yang memimpin upaya pengembangan SDM yang ada.

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada usaha untuk meningkatkan kualitas SDM di Negeri Tawiri, disparitas masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Pihak pemerintah Negeri Tawiri menghadapi kendala dalam pengembangan SDM karena terbatasnya sumber daya keuangan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam mendorong partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. Dalam beberapa kasus, inisiatif ini tampaknya lebih banyak dikuasai oleh penduduk dari luar Negeri Tawiri. Upaya lebih lanjut dan dukungan yang tepat dari berbagai pihak mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan SDM di Negeri Tawiri benar-benar merata dan bermanfaat bagi seluruh komunitas.

Dalam rangka mengatasi disparitas ini, penting bagi pemerintah Negeri Tawiri untuk mempertimbangkan berbagai langkah strategis. Pertama-tama, perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengembangan SDM. Kampanye pendidikan dan pelatihan yang relevan dapat membantu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan kepada masyarakat lokal, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses ini (Hutapia & Almanuar, 2020; Seran et al., 2023).

Selain itu, perlu dipertimbangkan alokasi anggaran yang lebih baik untuk mendukung program-program pengembangan SDM di berbagai sektor, termasuk perikanan. Pemerintah dapat mencari sumber daya tambahan, termasuk bantuan dari pemerintah pusat atau lembaga donor, untuk membiayai proyek-proyek yang dapat meningkatkan kualitas SDM secara merata. Penggunaan dana desa yang lebih efisien dan efektif juga dapat menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan anggaran.

Selanjutnya, perlu ditekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengembangan SDM. Pemerintah Negeri Tawiri dapat melibatkan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas SDM mereka sendiri.

Terakhir, perlu adanya kerja sama dengan pihak luar, termasuk pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk mendukung upaya pengembangan SDM yang merata di Negeri Tawiri. Kolaborasi ini dapat membawa sumber daya tambahan, pengetahuan, dan pengalaman yang berharga dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan disparitas dalam pengembangan SDM di Negeri Tawiri dapat diminimalkan, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari perbaikan kualitas SDM yang merata dan berkelanjutan. Hal ini akan membantu Negeri Tawiri untuk bersaing secara positif dengan daerah lain di Indonesia dan mencapai perkembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Memberikan Akses Yang Sama Kepada Seluruh Masyarakat

Akses merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mencari dan mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Akses ini menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menikmati berbagai fasilitas dan program yang telah disediakan oleh pemerintah demi kesejahteraan mereka (Fadhli & Fahimah, 2021; Kusmunawati & Syafruddin, 2023). Dalam konteks Negeri Tawiri, pentingnya akses yang merata bagi seluruh masyarakat menjadi sebuah prioritas. Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Bernard Ubuwala, menunjukkan bahwa pemerintah Negeri Tawiri telah mengambil langkah-langkah untuk memberikan akses kepada masyarakat, seperti penyediaan sarana pelatihan dan bantuan peralatan nelayan melalui dinas terkait. Pemerintah Negeri Tawiri juga memfasilitasi secara administratif dengan membantu kelompok nelayan dalam menyusun proposal untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, upaya pemerintah dalam bidang pendidikan juga mencakup penyediaan akses yang merata. Bapak William Marihuru, selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), menekankan pentingnya akses pendidikan dengan menyebutkan bahwa pemerintah Negeri Tawiri telah memberikan akses melalui SMP LKMD dan TK Mulawarman Tawiri. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang sama kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka (Noviyanti et al., 2022).

Namun, wawancara juga mengungkapkan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, tantangan masih ada dalam memastikan akses yang sepenuhnya merata di Negeri Tawiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Negeri Tawiri dapat terus berupaya untuk memperbaiki akses yang ada dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dari akses yang sama bagi semua. Dengan demikian, Negeri Tawiri dapat memastikan bahwa semua warganya dapat mengakses dan menikmati berbagai fasilitas dan program yang disediakan, sehingga

menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah Negeri Tawiri harus berkomitmen untuk mengatasi tantangan yang masih ada dalam mencapai akses yang merata bagi seluruh masyarakatnya. Akses di sini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga pelayanan kesehatan, pelatihan, dan dukungan sektor-sektor ekonomi kunci. Pertama-tama, penting untuk terus meningkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung akses yang merata. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan yang dapat diakses dengan mudah oleh semua komunitas, sehingga memudahkan mobilitas dan akses ke berbagai layanan. Selain itu, infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga perlu ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan yang memadai.

Selanjutnya, program pendidikan dan kampanye informasi perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya akses yang sama bagi semua warga. Masyarakat harus tahu bahwa akses yang merata tidak hanya berdampak positif pada kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga pada perkembangan Negeri Tawiri secara keseluruhan. Melalui edukasi dan komunikasi yang efektif, kesadaran ini dapat ditingkatkan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan akses. Masyarakat harus merasa memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan implementasi program-program yang memengaruhi akses mereka. Ini dapat mencakup pendekatan partisipatif dalam pengembangan proyek-proyek lokal dan pelibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang relevan.

Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti organisasi non-pemerintah dan pemerintah pusat, juga dapat membantu memperkuat upaya mencapai akses yang merata. Dukungan tambahan dalam bentuk sumber daya finansial, teknis, atau pengetahuan dapat mempercepat progres dan memberikan solusi untuk kendala yang mungkin dihadapi. Terakhir, penting untuk memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur kemajuan dalam mencapai akses yang merata. Data yang terkumpul dari pemantauan ini dapat membantu pemerintah mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan dan mengambil tindakan yang sesuai (ANDRIANTO, 2019; RAFSANJANI, 2023).

Dengan mengambil langkah-langkah ini, Negeri Tawiri akan dapat memastikan bahwa seluruh masyarakatnya memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan menikmati berbagai fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Ini tidak hanya akan menciptakan keadilan sosial yang lebih besar, tetapi juga akan meningkatkan potensi pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan di wilayah tersebut. Dengan mengatasi disparitas dalam akses, Negeri Tawiri akan lebih siap untuk bersaing secara positif dengan daerah lain di Indonesia dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Negeri Tawiri telah memberikan berbagai fasilitas kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu mereka memanfaatkan akses tersebut sesuai dengan kebutuhan individu maupun komunitas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi disparitas sosial di masyarakat. Dengan

memberikan akses yang sama kepada semua warga, pemerintah berusaha menciptakan landasan yang setara bagi semua anggota masyarakat, sehingga perbedaan dalam kelompok masyarakat dapat diminimalkan atau bahkan dieliminasi.

Pemerintah Negeri Tawiri telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Upaya tersebut meliputi memastikan ketersediaan fasilitas yang diperlukan dan membuatnya terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang mendukung, seperti jalan yang memudahkan akses ke layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan. Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa program-program pelatihan dan bantuan yang tersedia dapat diakses oleh semua warga tanpa memandang status sosial atau latar belakang mereka.

Dengan berbagai upaya ini, pemerintah Negeri Tawiri berharap dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini tidak hanya akan mengurangi disparitas sosial, tetapi juga akan memperkuat kesejahteraan dan potensi pembangunan di wilayah tersebut. Dalam keseluruhan konteksnya, upaya untuk memastikan akses yang sama bagi semua warga adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya pemerintah Negeri Tawiri untuk memastikan akses yang sama juga memiliki dampak yang lebih luas dan positif. Ketika seluruh warga memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah, ini dapat menghasilkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di wilayah tersebut. Penting untuk diingat bahwa kesenjangan sosial dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan berkelanjutan. Ketika sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pelatihan, pekerjaan, atau layanan kesehatan, potensi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan ekonomi terbatas (Suhartono & Mustofa, 2019). Namun, dengan memastikan akses yang sama, setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensinya, berkontribusi pada masyarakat, dan menciptakan perubahan positif. Selain itu, upaya pemerintah Negeri Tawiri dalam menciptakan kesetaraan akses mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Ini adalah tonggak penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan beradab.

Dengan demikian, memastikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat Negeri Tawiri adalah sebuah investasi dalam masa depan yang lebih baik bagi wilayah tersebut. Ini bukan hanya tentang mengatasi kesenjangan sosial, tetapi juga tentang menciptakan landasan yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan yang lebih besar, dan masyarakat yang lebih adil. Melalui upaya berkelanjutan ini, Negeri Tawiri dapat tumbuh dan berkembang sebagai sebuah komunitas yang bersatu, kuat, dan inklusif.

Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Upaya untuk menciptakan kinerja yang tinggi dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja memang memerlukan sejumlah faktor kunci, dan salah satunya adalah peningkatan kualitas kerja yang sesuai dengan potensi sumber daya manusia yang tersedia di setiap bidang pekerjaan. Dalam konteks ini, penting bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi individu yang ada. Hal ini mencakup identifikasi dan pengembangan keterampilan, bakat, dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap pekerja.

Dengan meningkatkan kompetensi dan keahlian sumber daya manusia yang ada, organisasi dapat mencapai tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. Peningkatan ini juga berdampak positif pada motivasi individu, karena mereka merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam pekerjaan mereka. Motivasi yang meningkat pada gilirannya menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif, di mana setiap anggota tim merasa termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab mereka.

Contoh konkret dalam hal ini adalah ketika masyarakat atau tenaga kerja memiliki kesempatan untuk bekerja dalam pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuan mereka. Misalnya, jika seseorang memiliki keterampilan khusus dalam teknologi informasi, memberikan mereka pekerjaan yang memanfaatkan keahlian tersebut akan memberikan hasil yang lebih baik daripada menempatkannya dalam pekerjaan yang tidak sesuai. Ini tidak hanya mendukung pertumbuhan individu, tetapi juga meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi atau proyek.

Dengan demikian, peningkatan kualitas kerja dan pemanfaatan potensi sumber daya manusia adalah faktor penting dalam menciptakan kinerja yang tinggi dalam berbagai konteks, baik di sektor bisnis, organisasi masyarakat, atau pemerintahan. Hal ini mendorong perkembangan individu, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan positif.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Bernard Ubuwala, mengungkapkan pendekatan bijaksana yang diterapkan oleh masyarakat Negeri Tawiri dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Menurut beliau, pendekatan ini berpusat pada pemanfaatan keterampilan individu yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa setiap individu di Negeri Tawiri cenderung menggunakan keterampilan dan keahlian yang mereka miliki dalam setiap tindakan atau pekerjaan yang mereka lakukan.

Sebagai contoh, dalam sektor perikanan, para nelayan di Negeri Tawiri cenderung menggunakan keterampilan yang mereka kuasai ketika menangkap ikan. Mereka mungkin menggunakan alat penangkap ikan seperti jaring atau alat tangkap lainnya yang sesuai dengan keterampilan mereka. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya memaksimalkan potensi masing-masing individu dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Negeri Tawiri memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya manusia mereka secara efektif. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki potensi yang berbeda, dan dengan memanfaatkan keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu, mereka dapat memenuhi kebutuhan komunitas dengan lebih baik.

Pendekatan ini juga mencerminkan kemampuan masyarakat Negeri Tawiri untuk melihat lebih jauh dari sekadar sumber daya fisik. Mereka menghargai aspek-aspek kualitatif dari sumber daya manusia, seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, sebagai elemen penting dalam pembangunan dan pertumbuhan. Dengan demikian, mereka memprioritaskan pemanfaatan sumber daya manusia mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi.

Dalam konteks yang lebih luas, pendekatan ini dapat menjadi contoh yang baik bagi banyak komunitas dalam memanfaatkan sumber daya manusia mereka dengan lebih bijaksana. Ini menggarisbawahi pentingnya menghormati keragaman keterampilan dan keahlian individu dalam mencapai tujuan bersama.

Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif adalah faktor kunci dalam memastikan kesinambungan dan kemajuan suatu organisasi atau komunitas. Salah satu cara yang efektif untuk mencapai tujuan ini adalah melalui pelatihan kerja yang bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan menginspirasi sumber daya manusia yang terampil dan bersemangat, sehingga mereka dapat menjadi aset yang dapat dipercaya oleh organisasi. Hasil dari wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Bernard Ubuwala, menggambarkan bagaimana pemerintah Negeri Tawiri telah aktif dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Bernard Ubuwala mencatat bahwa salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah Negeri Tawiri adalah melalui fasilitasi pelatihan kerja, khususnya kepada pemuda-pemuda di wilayah tersebut. Mereka difasilitasi untuk mengikuti diklat dalam bidang perbengkelan dan elektronik. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan pemuda-pemuda Negeri Tawiri dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang yang mereka pelajari.

Melalui pelatihan semacam ini, pemuda-pemuda Negeri Tawiri diberikan peluang untuk mengembangkan kompetensi mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan potensi mereka dalam dunia kerja. Mereka dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka, yang mencakup pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, pelatihan kerja seperti ini tidak hanya memberikan manfaat individual bagi pemuda, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan komunitas secara keseluruhan.

Pemerintah Negeri Tawiri menunjukkan komitmen untuk menjaga dan mengembangkan sumber daya manusia mereka dengan cara yang terarah. Ini menciptakan siklus positif di mana pemuda-pemuda yang telah menjalani pelatihan menjadi aset yang lebih berharga bagi komunitas, serta memberikan kontribusi yang lebih besar pada pembangunan Negeri Tawiri. Dengan demikian, pendekatan ini mencerminkan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia

yang bijaksana dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah langkah kunci dalam mencapai kesuksesan organisasi atau komunitas, dan seringkali hal ini memerlukan pendekatan yang berfokus pada target tertentu. Pendekatan ini bertujuan agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan standar pekerjaan yang telah dijadikan sebagai acuan dapat dicapai dalam semua aspek pekerjaan.

Dalam mengimplementasikan upaya peningkatan kualitas SDM, langkah penting yang harus diambil adalah meningkatkan kinerja individu dan tim secara keseluruhan. Ini memerlukan peningkatan dalam kerja yang dilakukan yang harus sesuai dengan tujuan organisasi atau proyek yang sedang dikerjakan. Selain itu, pemanfaatan potensi sumber daya manusia yang ada di setiap pekerjaan menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Peningkatan kualitas SDM tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis atau pengetahuan individu, tetapi juga melibatkan aspek motivasi yang sangat penting. Motivasi yang tinggi di antara tenaga kerja adalah pendorong yang kuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan efisien. Ketika individu merasa termotivasi, mereka lebih cenderung untuk bekerja keras dan memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab mereka.

Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM yang berbasis pada target tertentu adalah investasi yang sangat berharga. Ini menciptakan jalan menuju pencapaian tujuan yang lebih baik, standar pekerjaan yang lebih tinggi, dan kinerja yang lebih efisien. Selain itu, ini juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan sesuai dengan bidang pekerjaan dan tanggung jawab setiap pekerja. Dengan pendekatan yang tepat dalam peningkatan kualitas SDM, organisasi atau komunitas dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia mereka dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Bapak Bernard Ubuwala, membawa cahaya terhadap pendekatan yang bijaksana yang diterapkan oleh masyarakat Negeri Tawiri dalam memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Beliau mengungkapkan bahwa masyarakat Negeri Tawiri memiliki kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya manusia mereka, dengan berlandaskan pada keterampilan yang dimiliki oleh individu-individu dalam komunitas tersebut. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, menciptakan keseimbangan yang sejalan dengan tujuan dan kebutuhan mereka.

Sebagai contoh konkret, dalam hal penangkapan ikan, nelayan-nelayan di Negeri Tawiri memanfaatkan keterampilan yang mereka kuasai dengan sangat bijaksana. Mereka menggunakan alat penangkap ikan seperti jaring atau alat tangkap lainnya yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi dan keterampilan yang berbeda, dan dengan memanfaatkan keterampilan tersebut, mereka dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, hasil wawancara ini menggambarkan bahwa masyarakat Negeri Tawiri menghargai kekayaan keterampilan yang dimiliki oleh anggotanya. Mereka memahami pentingnya memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat mereka dan melihat keterampilan sebagai aset yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Pendekatan ini juga menciptakan kesempatan bagi individu-individu dalam masyarakat untuk aktif berkontribusi dan merasa bernilai, sehingga menciptakan iklim yang positif di dalam komunitas tersebut.

Dalam keseluruhan konteksnya, hasil wawancara ini menggambarkan bahwa masyarakat Negeri Tawiri telah mengambil langkah bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya manusia mereka sesuai dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dengan lebih efektif dan membantu menciptakan keseimbangan yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mereka.

Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Negeri Tawiri memiliki pendekatan yang cerdas dalam memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) mereka. Mereka mengutamakan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan individu-individu dalam komunitas sebelum mengalokasikan sumber daya manusia tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pendekatan ini menghasilkan pengelolaan SDM yang lebih efisien dan relevan dengan tugas dan tujuan yang harus dicapai.

Selain itu, pemerintah Negeri Tawiri juga turut berperan aktif dalam mengoptimalkan pengelolaan SDM. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah dengan memberikan fasilitas pelatihan kepada pemuda-pemuda di Negeri Tawiri, khususnya dalam bidang perbengkelan dan elektronik. Hal ini mencerminkan kesadaran pemerintah akan pentingnya investasi dalam pengembangan keterampilan SDM muda. Melalui pelatihan seperti ini, pemuda-pemuda tersebut dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja sesuai dengan bidang yang mereka pelajari.

Selanjutnya, pemuda-pemuda ini dapat mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama dalam konteks pekerjaan. Dengan demikian, pelatihan tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Negeri Tawiri.

Secara keseluruhan, pendekatan yang bijaksana dalam pengelolaan SDM, yang mencakup penilaian keterampilan individu dan investasi dalam pelatihan, adalah strategi yang baik dalam menciptakan komunitas yang lebih kuat dan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan. Ini juga menggambarkan komitmen pemerintah Negeri Tawiri dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan di wilayah mereka.

SIMPULAN

Hasil dari kajian ini menggambarkan bahwa kebijakan Anggaran Dana Desa (ADD) di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon telah membawa dampak positif yang signifikan dalam mencegah disparitas sosial di wilayah tersebut. Dalam rangka memahami mengapa kebijakan ADD ini efektif dalam mengatasi disparitas sosial, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat dijelaskan: Pertama, kebijakan ADD ini telah terbukti memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Negeri Tawiri. Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan melalui ADD telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, dan keterampilan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Kedua, kebijakan ADD juga telah berhasil dalam menciptakan akses yang merata bagi seluruh warga masyarakat. Ini berarti bahwa pendanaan ADD telah dikelola dengan baik dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap program-program yang disediakan. Ketiga, pengelolaan ADD yang efisien dan berhasil guna telah menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Negeri Tawiri dalam memastikan bahwa dana ADD digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keempat, kebijakan ADD ini juga memberikan dampak positif yang signifikan dalam hal pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Negeri Tawiri. Ini mencerminkan bahwa dana ADD digunakan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, dan menciptakan peluang pekerjaan bagi penduduk setempat. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa kebijakan ADD di Negeri Tawiri adalah salah satu instrumen yang efektif dalam memerangi disparitas sosial. Keberhasilannya dalam meningkatkan SDM, memberikan akses yang merata, mengoptimalkan pengelolaan dana, dan mendorong pemerataan pembangunan serta penciptaan lapangan pekerjaan merupakan bukti konkret dari dampak positif yang telah dihasilkannya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisaha, M. S., Tahir, A., & Igrisa, I. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulamayo Selatan Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. *Jambura Journal of Administration and Public Service*, 2(2), 59–71.
- ANDRIANTO, I. (2019). *Peran Belanja Daerah dan Program Pembangunan Terhadap Kemiskinan Dalam Disparitas Wilayah di Kabupaten Banjarnegara*. Universitas Gadjah Mada.
- Budiana, D. A., Said, D., & Sodiq, N. (2019). The Effect Of Village Device Competencies And Internal Control System On Accountability Of Village Management. *Scientific Research Journal*, 1(7), 10–20.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dan faktor anteseden yang mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan*

- Akuntansi*, 23(2), 145–159.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Fadhli, K., & Fahimah, D. A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, Dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (Kpm) Bantuan Sosial Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 118–124.
- Fifqiazah, A. O., & Rizka, S. A. (2023). *Pengelolaan Dan Akuntabilitas Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Positif (Studi di Desa Boto, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Havivah, N., Astuti, S. J. W., & Natsir, M. (2023). Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Desa Krucil Kabupaten Probolinggo. *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 13(2), 82–91.
- Hutapia, W., & Almanuar, B. (2020). Pengaruh Dana Desa Terhadap Disparitas Pembangunan Antar Kabupaten Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 43–52.
- Indriasih, D., Fajri, A., & Febriana, D. (2022). Pengaruh Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 972–981.
- Kasidi, D., & Yustika, S. (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 3595–3604.
- Kharisma, B. (2023). Strategi Pengembangan Digitalisasi Desa Wisata: Studi Kasus Desa Jatiluwuh, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
- Kusmunawati, R., & Syafruddin, S. (2023). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PERDESAAN. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 11(1), 96–105.
- Mlik, O., Renouw, A. A., & Banea, A. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Pada Kampung Klawaren, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 998–1007.
- Muzaqi, A. H., Susanto, D., Abror, M. D., & Ambulanto, T. (2022). Analisis Kebijakan Dana Desa dalam Merespon Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 122–144.
- Noviyanti, N. O., Hakim, L., & Azijah, D. N. (2022). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid Tahun 2020. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2347–2356.
- Nurlukman, A. D., & Said, F. F. (2019). Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 80–98.
- RAFSANJANI, H. (2023). *Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022*. Universitas Jenderal Soedirman.
- Seran, S. N., Susanti, R. A. D., & Kusufa, F. (2023). *Analisis Akuntabilitas Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Pada Desa Jombok Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang*. Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggaladewi.
- Suhartono, E., & Mustofa, M. (2019). Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa

- Di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 1(2), 131–144.
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149.
- Syahrudin, S., Kontu, F., Tambajong, H., & Adam, A. F. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 181–191.
- Taufiq, M., Suhirman, S., Sofhani, T. F., & Kombaitan, B. (2022). Rural planning within local development: Indonesian context. *World Review of Science, Technology and Sustainable Development*, 18(2), 194–212.
- Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village fund management transparency: A lesson learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 100–110.